



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 282 / KEP / 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 27/KEP/2024 TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE DAERAH EKONOMI

DAN KEUANGAN SYARIAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27/KEP/2024 tentang Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa sehubungan dengan perubahan personil Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27/KEP/2024 tentang Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41);
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27/KEP/2024 tentang Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 27/KEP/2024 TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27/KEP/2024 tentang Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Juli 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 282 / KEP / 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
27/KEP/2024 TENTANG PEMBENTUKAN
KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN
SYARIAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| NO | KEDUDUKAN DALAM KOMITE | NAMA/JABATAN/INSTANSI | TUGAS |
|-----------------|------------------------|-----------------------|---|
| PENGARAH | | | |
| 1 | KETUA | GUBERNUR DIY | a. memberikan arahan terkait kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah; dan b. melakukan penguatan penyelenggaraan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam bentuk dukungan kebijakan dan sumber daya. |
| 2 | WAKIL KETUA | WAKIL GUBERNUR DIY | membantu pelaksanaan tugas ketua terkait arahan kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah |

| | | | |
|------------------|------------------------|---|--|
| 3 | ANGGOTA | 1) KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA DIY | memberikan saran dan pandangan terhadap kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah |
| | | 2) KEPALA OTORITAS JASA KEUANGAN DIY | |
| | | 3) KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIY | |
| | | 4) KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA DIY | |
| PELAKSANA | | | |
| 4 | KETUA PELAKSANA HARIAN | SEKRETARIS DAERAH DIY | <p>a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan pemberian arahan terkait kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah; dan</p> <p>b. membantu Ketua dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah</p> |
| 5 | SEKRETARIS | 1) ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH DIY BIDANG PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI UMUM | <p>a. memantau, memberikan rekomendasi, dan mengevaluasi kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah serta kinerja koordinator bidang; dan</p> <p>b. menyampaikan laporan secara berkala kepada Ketua dan Wakil Ketua</p> |
| | | 2) ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH DIY BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | |
| | | 3) ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH DIY BIDANG PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MASYARAKAT | |

| | | | |
|--|-------------------|--|--|
| 6 | SEKRETARIAT | 1) KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DIY | a. mendampingi Koordinator Bidang menjalankan tugas; dan |
| | | 2) KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA DIY | b. memberikan dukungan administratif kepada pimpinan dan anggota KDEKS. |
| 7 | BIDANG | | |
| a. BIDANG JASA KEUANGAN SYARIAH | | | |
| 1) | KOORDINATOR | DEPUTI DIREKTUR OTORITAS JASA KEUANGAN DIY | a. penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan koordisasi program strategis di bidang jasa keuangan syariah; |
| 2) | WAKIL KOORDINATOR | DIREKTUR UTAMA BANK BPD DIY | b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program strategis di bidang jasa keuangan syariah; dan c. menyusun bahan rekomendasi kebijakan jasa keuangan syariah. |
| b. BIDANG INDUSTRI DAN PARIWISATA HALAL | | | |
| 1) | KOORDINATOR | KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY | a. penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan koordisasi program strategis di bidang industri dan pariwisata halal; |
| 2) | WAKIL KOORDINATOR | KEPALA DINAS PARIWISATA DIY | b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program strategis di bidang industri dan pariwisata halal; dan c. menyusun bahan rekomendasi kebijakan industri dan pariwisata halal. |

| | | |
|---|---|---|
| c. BIDANG KEUANGAN SOSIAL SYARIAH | | |
| 1) KOORDINATOR | KEPALA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DIY | a. penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan koordisasi program strategis di bidang keuangan sosial syariah; b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program strategis di bidang keuangan sosial syariah; dan c. menyusun bahan rekomendasi kebijakan keuangan sosial syariah. |
| 2) WAKIL KOORDINATOR | KEPALA BADAN WAKAF INDONESIA DIY | |
| d. BIDANG BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN SYARIAH | | |
| 1) KOORDINATOR | KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM DIY | a. penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan koordisasi program strategis di bidang bisnis dan kewirausahaan syariah; b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program strategis di bidang bisnis dan kewirausahaan syariah; dan c. menyusun bahan rekomendasi kebijakan bisnis dan kewirausahaan syariah. |
| 2) WAKIL KOORDINATOR | KETUA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA DIY | |
| e. BIDANG INFRASTRUKTUR EKOSISTEM SYARIAH | | |
| 1) KOORDINATOR | KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DIY | a. penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan koordisasi program strategis di bidang infrastruktur ekosistem syariah; |
| 2) WAKIL KOORDINATOR | KETUA MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH DIY | |

| | | | |
|---|----------------------|---|---|
| | | | <p>b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program strategis di bidang infrastruktur ekosistem syariah; dan</p> <p>c. menyusun bahan rekomendasi kebijakan infrastruktur ekosistem syariah.</p> |
| f. BIDANG EDUKASI DAN KAJIAN EKONOMI SYARIAH | | | |
| | 1) KOORDINATOR | REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA | <p>a. penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan koordisasi program strategis di bidang edukasi dan kajian ekonomi syariah;</p> <p>b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program strategis di bidang edukasi dan kajian ekonomi syariah; dan</p> <p>c. menyusun bahan rekomendasi kebijakan bidang edukasi dan kajian ekonomi syariah.</p> |
| | 2) WAKIL KOORDINATOR | REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | |
| 8 | ANGGOTA | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | <p>melaksanakan program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.</p> |
| | | 1) PANIRADYA PATI | |
| | | 2) KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DIY | |
| | | 3) KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA DIY | |
| | | 4) KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DIY | |
| | | 5) KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY | |

| | | |
|--|--|--|
| | 6) KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY | |
| | 7) KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DIY | |
| | 8) KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY | |
| | 9) KEPALA DINAS SOSIAL DIY | |
| | 10) KEPALA DINAS KESEHATAN DIY | |
| | 11) KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY | |
| | 12) KEPALA BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA DIY | |
| | 13) KEPALA BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL SETDA DIY | |
| | UNSUR LEMBAGA/BADAN/INSTANSI/ ASOSIASI/ORMAS | melaksanakan program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. |
| | 1) KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DIY | |
| | 2) KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL DIY | |
| | 3) KEPALA BURSA EFEK INDONESIA PERWAKILAN DIY | |




| | | |
|--|--|--|
| | 4) KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH PERKUMPULAN BANK SYARIAH INDONESIA DIY | |
| | 5) KETUA DEWAN PENGURUS DAERAH PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT INDONESIA DIY | |
| | 6) KETUA ASOSIASI BAITUL MAAL WA TAMWIL SE-INDONESIA DIY | |
| | 7) KETUA PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA DIY | |
| | 8) KETUA PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH DIY | |
| | 9) KETUA DEWAN MASJID INDONESIA DIY | |
| | 10) KETUA GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA DIY | |
| | 11) KETUA YAYASAN EDUKASI WAKAF INDONESIA | |
| | 12) KETUA HIMPUNAN EKONOMI BISNIS PESANTREN DIY | |
| | 13) PIMPINAN CABANG BSI YOGYAKARTA SUDIRMAN | |
| | 14) DEPUTI BISNIS PT. PEGADAIAN AREA YOGYAKARTA | |



| | | |
|--|---|--|
| | PERGURUAN TINGGI | melaksanakan program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. |
| | 1) REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA | |
| | 2) REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA | |
| | 3) REKTOR UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN | |
| | 4) REKTOR UNIVERSITAS ALMA ATA | |
| | 5) REKTOR UNIVERSITAS NAHDHILATUL ULAMA | |

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Hamengku

HAMENGGU BUWONO X